

BAB II

KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA

Kekalahan Uni Soviet pada Perang Dingin dalam melawan Amerika Serikat menciptakan paradigma baru dalam kekuatan tunggal dunia. Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adikuasa di dunia. Adanya paradigma tersebut dimanfaatkan Amerika untuk membenarkan kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri Amerika dibuat demi mendapat keuntungan terkait kompetisi ekonomi, memperkuat pertahanan, mewujudkan perdamaian, dan upaya perluasan ideologi demokrasi.

A. Kepentingan Nasional Amerika Serikat

Politik luar negeri dirumuskan sesuai dengan kepentingan nasional dan peluang dalam hubungan internasional.¹¹ Tindakan-tindakan Amerika Serikat tercermin dalam serangkaian kebijakan luar negerinya yang berkaitan dengan kompetisi ekonomi, memperkuat pertahanan perbatasan negara, mewujudkan perdamaian, dan upaya perluasan ideologi demokrasinya. Karakteristik kebijakan luar negeri Amerika tidak bersifat tetap dan bergantung pada bagaimana Amerika merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang ingin diperoleh.

Demi melindungi kepentingan-kepentingan nasionalnya Amerika berupaya untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada sekutunya, termasuk di kawasan Asia Timur.¹² Dalam rangka memberikan perlindungan dan dukungan tersebut, Amerika terus

¹¹ Farid, Wadji. Politik Luar Negeri Amerika Pasca Tragedi WTC. The Fice (2013)

¹² Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan merupakan sekutu terdekat Amerika di kawasan Asia Timur.

berupaya meningkatkan aliansi dengan sekutunya. Aliansi tersebut dilakukan Amerika untuk menjaga kepentingan di negara sekutu.

Salah satu bukti dukungan Amerika Serikat dengan negara sekutu terdekatnya adalah bantuan Amerika Serikat ke Korea Selatan dalam konflik yang terjadi di Semenanjung Korea yang berlangsung pada tahun 1950 hingga 1953. Konflik ini membagi Korea menjadi dua wilayah yaitu Korea Utara dan Korea Selatan.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Korea

Sumber : <https://www.google.com/url>

Perang Korea ini juga disebut dengan “perang yang dimandatkan” atau *proxy war* antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet dan beberapa negara komunis lainnya. Perang ini dilatar belakangi oleh keterlibatan sekutu terdekat kedua negara. Korea Utara yang didukung oleh sekutunya Uni Soviet dan Korea Selatan didukung Amerika Serikat. Sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, Amerika mengusulkan pendapatnya untuk melakukan sidang dengan membicarakan konflik yang terjadi di Korea. DK-PBB pun menyetujui usulan Amerika untuk melakukan sidang melalui beberapa perundingan. Pada sidang tersebut pun menghasilkan

sebuah resolusi PBB kepada pemerintah Korea Utara. Resolusi tersebut berisi tentang:

- a. Mendesakan kepada Korea Utara agar segera menghentikan perang dan menarik mundur pasukannya dari batas Lintang Utara di Korea Selatan.
- b. Memberikan sanksi kepada Korea Utara apabila tidak menjalankan desakan tersebut dengan memberikan bantuan kepada Korea Selatan.

Sebagai sekutu Uni Soviet dan negara yang berlokasi di kawasan Asia Timur, membuat China ikut terlibat dalam membantu Korea Utara. Kekuatan China sebagai sekutu Uni Soviet mampu memberikan bantuan dan dukungan dalam melawan Korea Selatan sebagai sekutu Amerika. Kerjasama antara China dan Uni Soviet dalam membantu Korea Utara menciptakan pertahanan komunis di Asia semakin kuat. Namun, hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan China menjadi terputus. China pun berkembang menjadi kekuatan baru di Asia menggantikan kedudukan Jepang.

Terlibatnya China dalam perang Korea membuat Amerika Serikat geram dan semakin gencar membantu Korea Selatan melakukan operasi-operasi serangan ke Korea Utara. Amerika khawatir dengan bantuan China penyebaran paham komunis akan menyebar ke wilayah Asia Timur. Amerika menggunakan personel tentara VIII dan Korps X yang meliputi kekuatan darat PBB yang beranggotakan 15 negara¹³. Akibat dari perlawanan itu, situasi semakin tak terkendali dan mendorong diadakannya perundingan sehingga menghasilkan gencatan senjata pada 27 Juli 1953.

Dalam gencatan senjata tersebut, Amerika Serikat menyatakan mengakui keunggulan Korea Utara dalam perang selama tiga tahun itu. Amerika juga merasa bahwa saat perang terjadi, militer Amerika tidak sanggup untuk menandingi kekuatan Korea Utara yang mendapat dukungan serta bantuan militer dari Uni Soviet. Sehingga Amerika menyatakan untuk melakukan aksi gencatan

¹³ Pasukan tentara VIII dan Korps X PBB meliputi Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia, Selandia Baru, Swedia, Thailand, Belanda, Belgia, Kanada, Turki, Yunani, Afrika Selatan, India, dan Filipina.

senjata dengan Korea Utara. Akibat dari perang tersebut telah menewaskan banyak korban jiwa pada tiap negara yang terlibat, baik itu korban pasukan militer maupun sipil. Tercatat dari 600.000 warga Korea, terdapat sebanyak 85% warga sipil yang kehilangan nyawa. Berikut adalah data korban militer maupun sipil yang tewas dalam perang Korea:

Tabel 2.1 Data Korban Tewas Dalam Perang Korea

No	Negara	Jumlah Korban Pasukan Militer
1	Amerika Serikat	39.914 jiwa
2	China	450.000 jiwa
3	Korea Utara	2.000.000 jiwa
4	Korea Selatan	415.005 jiwa

Sumber : <http://www.hariansejarah.id/2017/02/perang-korea.html>

Genjatan senjata tersebut menghasilkan garis demarkasi militer yang memisahkan Korea menjadi dua. Korea terbagi pada garis lintang 38° dari muara sungai Han menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Perang Korea tersebut berhenti untuk sementara dan sewaktu-waktu dapat pecah kembali. Dalam gencatan senjata tersebut ditandatangani oleh pihak Amerika Serikat, Korea Utara, China, dan Uni Soviet. Pihak Korea Selatan enggan menandatangani gencatan senjata tersebut, namun menyatakan bahwa Korea Selatan akan menghormati proses gencatan senjata yang terjadi. Uni Soviet menguasai bagian utara dan Amerika pada bagian selatan.

Pada tanggal 8 Agustus 1953 Amerika Serikat dan Korea Selatan membuat perjanjian bersama berupa perlindungan dari Amerika Serikat terhadap Korea Selatan apabila terjadi serangan militer dari luar. Perjanjian tersebut dilakukan di Seoul sebagai ibukota Korea Selatan dan ditandatangani oleh John Foster Dulles selaku Menteri Luar Negeri Amerika dan Syng Man Rhee selaku Presiden Korea Selatan.



Gambar 2.2 Garis Demarkrasi Korea

Sumber :

http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/history/nucleus_history.htm

Dalam masa genjatan senjata ini, Amerika semakin dikenal dunia sebagai negara adikuasa. Hal menjadi keuntungan tersendiri bagi Amerika dalam mencapai kepentingan nasionalnya dengan mencari dukungan di kawasan Asia dalam rangka perluasan pengaruhnya. Kawasan Korea merupakan wilayah yang strategis¹⁴ di

¹⁴ Korea berada pada wilayah yang strategis di Asia karena letaknya yang berada di antara negara-negara maju seperti China, Rusia, Jepang, dan Amerika Serikat.

wilayah Asia. Sehingga Amerika terus berupaya melakukan aliansi dengan Korea Selatan dan kawasan di sekitarnya.

Disisi lain, sebagai akibat dari gencatan senjata pada konflik Korea tersebut berdampak pada perkembangan sistem internasional yang mengalami polarisasi kekuatan. Dimana kekuatan Barat di bawah komando Amerika Serikat dan kekuatan Timur di bawah pimpinan Uni Soviet. Perubahan fundamental politik juga terjadi di kawasan Asia. Kedekatan antara China dan Uni Soviet membuat Presiden Truman menerapkan kebijakan luar negeri untuk membendung penyebaran komunis di kawasan Asia Timur.

Dalam upaya pembendungan tersebut, Amerika melakukan perubahan fundamental terhadap Jepang. Perubahan tersebut berupa perijinan untuk membentuk pasukan bela diri Jepang agar dapat menangkal pengaruh komunis. Amerika menganggap bahwa Jepang mampu menjadi benteng utama di Asia untuk membendung penyebaran komunis.

Posisi China yang berada di wilayah Asia, mengakibatkan China lebih dirujuk sebagai penyebar komunis daripada Uni Soviet. China lebih banyak memahami seluk-beluk kawasan Asia dibandingkan Uni Soviet. Sehingga Amerika beranggapan bahwa China lebih berbahaya dibanding Uni Soviet karena letak negara tersebut yang berada di kawasan Eropa.

Selain untuk menjaga kepentingan keamanan dan pertahanan setelah gencatan senjata pada konflik Korea, Amerika juga mengupayakan agar mampu membendung perkembangan komunis secara intensif. Untuk mencegah paham komunis itu menyebar, Amerika Serikat menerapkan kebijakan luar negerinya dengan mempererat aliansi.

South East Asia Traty Organization atau disingkat dengan SEATO adalah bentuk kerjasama pertahanan yang muncul setelah perang Korea. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1953 dengan beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia, Selandia Baru, Filipina, Thailand, Pakistan, dan Korea Selatan. Selain untuk kepentingan dengan pembendungan politik, Amerika juga memiliki tujuan jangka panjang dalam kepentingannya terus

mempererat kerjasama dengan Korea Selatan. Tujuan tersebut masih didominasi dengan resolusi damai konflik, proliferasi nuklir, demokratisasi, rekonsiliasi, dan reunifikasi di Semenanjung Korea.

Aliansi keamanan antara Amerika lebih menggunakan pendekatan diplomatik, pertahan keamanan, dan ekonomi daripada melakukan perlawanan dengan senjata. Amerika juga berkomitmen untuk membantu Korea Selatan dalam menjaga negara tersebut dari upaya agresi militer Korea Utara melalui penempatan pasukan militernya di Korea Selatan. Dalam menjalankan kepentingan luar negerinya, Amerika mendukung penuh terciptanya stabilitas keamanan dengan berupaya menciptakan reunifikasi yang menguntungkan bagi negaranya. Amerika secara resmi mendukung objektivitas reunifikasi Korea.

Korea Selatan dan Amerika menginginkan masa depan yang lebih baik bagi Semenanjung Korea melalui aliansi perdamaian dengan nilai-nilai demokrasi dan ekonomi pasar bebas. Dapat dikatakan bahwa Amerika ingin Korea Utara dan Korea Selatan mampu bersatu dengan ideologi demokrasi dan pasar bebas yang berkiblat ke Amerika. Keinginan untuk melakukan reunifikasi Korea dengan harapan dapat memperkuat pengaruh ideologi Amerika di Asia Timur. Amerika juga akan memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Asia Timur dan perdagangan bebas.

B. Hegemoni Amerika Serikat

Berakhirnya Perang Dingin bukan berarti berakhir pula ketegangan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Berbagai konflik masih terus terjadi antara Amerika dan Uni Soviet saling memperebutkan pengaruhnya terutama di kawasan Asia Timur. Kedua negara yang saling bertentangan ideologi ini membagi Korea menjadi dua wilayah administratif yang pada awalnya dibuat untuk mengawasi penarikan pasukan Jepang di Korea. Bagian Utara di kendalikan oleh Uni Soviet dengan paham komunisnya dan bagian Selatan dikendalikan oleh Amerika Serikat dengan ideologi demokrasinya. Amerika mengejar strategi hegemoninya untuk

mempertahankan pengaruhnya di wilayah untuk tatanan internasional berdasarkan nilai dan interesnya.

Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama memiliki anggapan bahwa kawasan Semenanjung Korea ini sebagai lokasi yang strategis dalam penyebaran masing-masing ideologi ke dunia. Korea Utara didukung Uni Soviet dan China dengan ideologi komunis. Sedangkan Korea Selatan didukung Jepang dan Amerika Serikat dengan ideologi kapitalis. Semenjak itu, Korea terbagi menjadi dua dan tidak saling mengakui keabsahan pemerintahan satu sama lain. Dominasi Amerika nampak pada keterlibatan Amerika saat perselisihan di Korea terjadi sehingga Amerika menjadi pelaku penting dalam konflik tersebut. Citra Amerika sebagai polisi dunia pun mulai terbentuk karena tanpa bantuan militer Amerika, kota Busan di Korea Selatan akan berhasil direbut oleh militer Korea Utara.

Pada pertengahan tahun 2011, Presiden Barack Obama mengumumkan mengenai kebijakan luar negeri negaranya yang akan fokus ke Asia dengan slogan "*Privot to Asia*" yang berarti berporos ke Asia. Pertumbuhan China yang mengarah menjadi negara adidaya serta pengaruh dari Australia menjadi alasan utama Amerika mengeluarkan kebijakan tersebut. Kebijakan luar negeri Amerika tersebut bukanlah strategi utama untuk mempertahankan keyakinan Amerika di Korea Selatan dalam isu konflik yang terjadi di Korea. Namun, upaya tersebut juga dilakukan demi mendapat kekuatan di tingkat global dimana posisi Amerika sebagai negara adidaya.

Untuk itu, cara yang dilakukan oleh Amerika adalah dengan terus berperan aktif membantu Korea Selatan menghadapi ancaman agresi dari Korea Utara. Salah satunya adalah membentuk *South East Asia Treaty Organization* di tahun 1954 yang beranggotakan 9 negara termasuk Amerika dan Korea Selatan. Terlebih saat Korea Utara memiliki program pengembangan senjata pemusnah masal. Di tahun 1994, Pemerintah Korea Utara setuju untuk menghentikan program nuklirnya dan memulai kerjasama dengan Amerika.

Atas kepemilikan senjata nuklir yang terdeteksi oleh satelit Amerika, pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa Korea

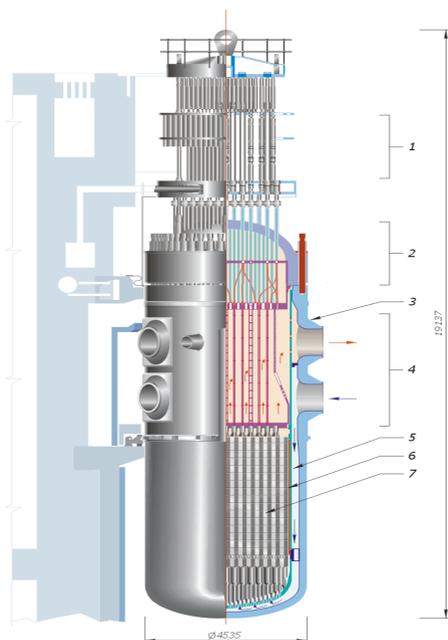
Utara telah memulai program rahasia senjata nuklir pada bulan Oktober 2002. Hal tersebut memicu ketegangan antara Amerika dan Korea Utara. Hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan juga semakin memburuk yang diakibatkan dari tenggelamnya kapan angkatan laut Korea Selatan.

Korea Selatan mencurigai kapal tersebut sengaja ditenggelamkan oleh pihak Korea Utara. Atas kecurigaan tersebut, situasi pun semakin memanas. Korea Utara mendeportasi semua warga Korea Selatan yang berada di Korea Utara bahkan kapal dan pesawat milik Korea Selatan pun dilarang melintas daerah teritori Korea Utara. Kondisi seperti ini pun dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk mempererat aliansi dengan Korea Selatan melalui kerjasama militer.

Kepemilikan nuklir oleh Korea Utara dianggap sebagai sebuah ancaman bagi Amerika Serikat karena pemerintah Korea Utara kerap melakukan uji coba rudalnya yang dikhawatirkan mampu membumi-hanguskan Amerika. Untuk itu Amerika meminta Korea Utara agar terlibat dalam perundingan *Non Proliferasi of Nuclear Weapons* atau NTP pada tahun 1985.

Kesepakatan ini dibuat dalam rangka upaya penghentian program nuklir Korea Utara dan Amerika berjanji akan memberikan bantuan energi kepada Korea Utara. Amerika juga meminta agar Korea Utara menerima tim *International Atom Energy Assosiation* (IAEA) dalam memeriksa nuklir di Yongbyon, Korea Utara. Namun permintaan tersebut ditolak dan Korea Utara mengancam akan keluar dari NTP.

Pada tahun 1994, Amerika tetap menunjukkan dominasinya di kawasan Korea. Amerika melakukan diplomasi damai yang dipelopori oleh Jimmy Carter dengan menghasilkan *Agreed Framework*. Kesepakatan tersebut membahas mengenai bantuan dari Amerika ke Korea Utara sebagai timbal balik atas penutupan reaktor nuklir. Penutupan reaktor nuklir tersebut tidak berlangsung lama karena Korea Utara membuka kembali pangkalan reaktornya.



Gambar 3.3 Reaktor Tipe Light-Water

Sumber : <https://www.nuclear-power.net/nuclear-power-plant/reactor-types/lwr-light-water-reactor/>

Dalam setiap kesepakatan, Amerika selalu menawarkan intensif kepada Korea Utara agar bersedia menghentikan program nuklirnya. Upaya Amerika ini dimaksudkan agar Amerika Serikat mampu memasok dua reaktor tipe *light-water*. Namun Amerika gagal melakukan kesepakatan dan Korea Utara kembali melanjutkan program pengembangan reaktornya.

Atas aksi Korea Utara tersebut, Amerika kembali melakukan upaya denuklirisasi dengan melibatkan negara di sekitar kawasan. Perundingan tersebut dikenal dengan *Six Party Talks* yang

beranggotakan enam negara. Keenam negara tersebut adalah Korea Selatan, Amerika Serikat, Korea Selatan, China, Jepang, dan Rusia. Perundingan ini dilakukan selama enam periode. Hingga periode kelima, perundingan tersebut belum menghasilkan sesuatu. Pada perundingan keenam, Pyongyang setuju untuk menutup reaktor nuklir.

Kesepakatan antara Amerika dan Korea Utara terus dilakukan namun sering gagal mencapai kesepakatan mengenai keamanan dan perdamaian. Negosiasi yang cenderung lambat ini mengakibatkan Amerika gagal melakukan hegemoninya di Korea Utara sehingga kedua negara ini tidak memiliki hubungan diplomatik yang formal seperti hubungan antara Amerika dengan Korea Selatan. Bulan Februari di tahun 2002, Presiden George W. Bush memberi pernyataan bahwa Irak, Iran, dan Korea Utara sebagai bagian dari *axis of evil* dan *outpost of tyranny* yang harus dipurangi. Menurut Bush negara-negara tersebut menyebarkan senjata pemusnah masal serta mengancam perdamaian dunia.

Atas pernyataan Bush tersebut, Amerika semakin meningkatkan kontrol militer atas kawasan Korea Selatan. Dominasi Amerika ke Korea Selatan ditunjukkan dengan mendukung terlibatnya Korea Selatan dalam Prakarsa Keamanan Proliferasi atau *Proliferasi Security Initiative* (PSI) pada tahun 2008. Melalui keanggotaan ini, Korea Selatan berhak mencegah masuknya kapal-kapal milik Korea Utara yang diduga membawa bahan-bahan persenjataan nuklir maupun rudal.

Amerika melakukan kerjasama militer dengan Korea Selatan. Sebanyak 37.000 tentara Amerika ditempatkan di pangkalan militer Korea Selatan dan semakin intens melakukan latihan militer gabungan. Pada tahun 2009, Amerika dan Korea Selatan mengadakan latihan militer gabungan. Salah satu latihan yang rutin dilakukan adalah *Ulchi Focus Lens* (UFL). UFL melibatkan sekitar 10.000 tentara Amerika, 8.000 pasukan Korea Selatan dan berlangsung selama 12 hari. Latihan perang UFL disimulasikan oleh komputer dan bertujuan untuk merespon isu invasi. Aksi latihan gabungan tersebut kerap mendapat ancaman dari Korea Utara yang menganggap bahwa aksi itu sebagai persiapan perang. Pihak Korea

Selatan dan Amerika pun tidak terpengaruh dan terus melakukan upaya kerjasama sebagai bagian dari aksi pertahanan negara.

Sejak Korea Selatan di pimpin oleh Lee Myung Bak dan Amerika Serikat dipimpin oleh Barack Obama, koordinasi kedua negara mengenai kebijakan atas tindakan Korea Selatan semakin terarah dan solid. Amerika menempatkan sebanyak 28.500 pasukan militernya di Korea Selatan. Kebijakan Amerika Serikat ini memfokuskan pada penguatan militer di Asia khususnya Asia Timur. Penempatan pasukan militer Amerika pun menciptakan rasa aman bagi pihak Korea Selatan dari upaya agresi Korea Utara.

Bagi Amerika, strategi hegemoninya dalam melakukan hubungan bilateral telah berperan bagi terciptanya tatanan regional dan membantu peredaan pengembangan *major power*. Konflik regional berskala lokal maupun meluas pun dapat diatur oleh Amerika. Terdapat dua hal yang menjadikan Amerika sebagai kekuatan hegemoni, pertama Amerika melakukan hubungan bilateral dengan negara Korea Selatan. Korea Selatan dianggap sebagai negara kunci di kawasan Asia Timur karena posisinya yang berada di wilayah strategis. Hubungan bilateral antara Amerika dengan Korea Selatan adalah sebagai hasil refleksi kelanjutan hubungan kedua negara ini saat Perang Dingin. Kedua adalah kehadiran militer Amerika di negara-negara sekutunya seperti Korea Selatan dan Jepang. Strategi hegemoni Amerika telah berperan dalam terciptanya tatanan regional dan membantu peredaan pengembangan *major power* dari rivalitas seperti Jepang dan China. Amerika juga mengatur beberapa konflik regional yang dapat mengakibatkan perang.

C. Ekonomi Militer Amerika Serikat

Amerika tidak termasuk dalam kawasan negara di bagian Asia Timur tetapi sebagai satu-satunya negara adikuasa dunia, kebijakan luar negeri Amerika mampu memberikan pengaruh kepada negara lain. Sejak Amerika secara terbuka menyatakan hegemoninya di atas dunia, Amerika melihat bahwa China tumbuh menjadi tantangan baru bagi Amerika. Untuk mempertahankan kepentingan

Amerika di negara-negara kawasan Asia Timur, Amerika terus berupaya melakukan kerjasama terutama di bidang pertahanan dengan Korea Selatan sebagai sekutu terdekatnya.

Dalam skala luas, keterlibatan Amerika dalam strategi keamanan di kawasan Asia Timur didasarkan pada promosi demokrasi dan upaya pembendungan penyebaran komunis. Amerika Serikat membuat pakta pertahanan dengan Korea Selatan dengan penandatanganan mutual *Defence Treaty*. Kebijakan tersebut sebagai perwujudan upaya pencegahan konflik senjata di Semenanjung Korea sesuai komitmen Amerika dalam mempertahankan *balance of power* di Asia Timur.

Hadirnya Amerika dalam instabilitas politik di kawasan Semenanjung Korea sebagai sekutu Korea Selatan menjadi alasan bagi Korea Utara dalam mengembangkan senjata nuklirnya. Dengan kondisi seperti ini, Korea Selatan dan Amerika saling meningkatkan kerjasama militer sebagai simbol pertahanan dan keamanan. Upaya kerjasama bilateral Korea Selatan dan Amerika ditanggapi sebagai tindakan provokatif dari Amerika dan Korea Selatan untuk menunjukkan kekuatan pertahanan dan keamanan kedua negara tersebut.

Pada tahun 2006, strategi keamanan nasional Amerika Serikat merujuk pada pertahanan aliansi dan melanjutkan kemitraan yang didukung dengan integrasi ekonomi dan memperluas perdagangan serta mempromosikan demokrasi. Hal tersebut terus diupayakan Amerika dengan meningkatkan hubungan bilateral maupun multilateral untuk menangkal kemungkinan munculnya *major power* baru yang timbul menjadi potensi ancaman di masa mendatang.

Strategi keamanan Amerika tentu didukung penuh oleh faktor ekonomi. Kemajuan ekonomi negara Amerika mampu menopang keseluruhan anggaran militer dan menjalin hubungan bilateral. Kekuatan militer dan senjata guna melancarkan strategi keamanan tersebut mampu dilakukan karena ekonomi yang kuat dari industri Amerika Serikat yang berupa anggaran yang jumlahnya cukup besar. Perekonomian dan industri yang besar membuat Amerika memiliki kehebatan di sektor militer dan keamanan

pertahanan yang luar biasa maju. Sehingga anggaran belanja Amerika banyak digunakan pada militer.

Dalam konflik di Korea dan isu nuklir Korea Utara yang terus memanas, Amerika yakin bahwa Korea Utara memiliki kemampuan untuk menempatkan nuklir pada bagian kepala hulu ledak rudal balistiknya pada KN-08 dan akan menembakkan ke wilayah daratan Amerika. Adanya ancaman tersebut, Amerika menciptakan sistem pertahanan anti rudal balistik berupa *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD). THAAD adalah sistem pertahanan rudal yang unik dan canggih dengan presisi yang tak tertandingi dan mampu melawan ancaman di seluruh dunia dengan mobilitas yang tinggi. Amerika menempatkan THAAD di Semenanjung Korea sebagai perlindungan wilayah sekutu.

Militer Amerika Serikat merupakan salah satu yang terkuat di dunia karena anggaran dana negaranya banyak dialokasikan untuk sektor keamanan dan pertahanan, bahkan terbesar di dunia. Menurut SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) posisi Amerika menempati urutan pertama dalam hal pengeluaran anggaran belanja militer terbanyak sejak 2004 hingga 2013.

Tabel 2.2 Anggaran Belanja Militer

Rank		Country	Spending, 2013 (\$ b.)	Change, 2004-13 (%)	Spending as a share of GDP (%) ^d	
2013	2012				2013	2004
1	1	USA	640	12	3.8	3.9
2	2	China	[188]	170	[2.0]	[2.1]
3	3	Russia	[87.8]	108	[4.1]	[3.5]
4	7	Saudi Arabia	67.0	118	9.3	8.1
5	4	France	61.2	-6.4	2.2	2.6
6	6	UK	57.9	-2.5	2.3	2.4
7	9	Germany	48.8	3.8	1.4	1.4
8	5	Japan	48.6	-0.2	1.0	1.0
9	8	India	47.4	45	2.5	2.8
10	12	South Korea	33.9	42	2.8	2.5
11	11	Italy	32.7	-26	1.6	2.0
12	10	Brazil	31.5	48	1.4	1.5
13	13	Australia	24.0	19	1.6	1.8
14	16	Turkey	19.1	13	2.3	2.8
15	15	UAE ^b	[19.0]	85	4.7	4.7
Total top 15			1 408			
World total			1 747	26	2.4	2.4

Sumber : Sipri.com

Data tersebut menunjukkan betapa besarnya anggaran pertahanan Amerika Serikat dibandingkan dengan negara lain di seluruh dunia. Bahkan dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa belanja militer Amerika hampir tiga kali lipat dari China dan Rusia.

Amerika juga membuat program Penjualan Kebutuhan Militer Luar Negeri atau *US Foreign Military Sales* (FMS) dan Pendanaa Militer Luar Negeri atau *Foreign Military Financing* (FMF) yang memainkan peran kunci dalam mendukung strategi campur tangan regional Amerika.. FMS menjamin kebutuhan kritis dengan sekutu dengan memfasilitasi operasi pertahanan bersama. Program FMS diharapkan mampu membuat negara-negara sekutu dapat memperbaiki kapabilitas pertahanan mereka dengan mendanai akuisi peralatan militer Amerika.

Baru-baru ini Amerika telah berhasil mengembangkan sistem pertahanan anti-rudal yang mampu menangkal rudal milik Korea Utara. Sistem pertahanan tersebut telah dikembangkan sejak tahun 1992 oleh perusahaan pembuat peralatan senjata dan barang pertahanan terbesar yang berbasis di Bethesda, Amerika Serikat yaitu Lockheed Martin. Perusahaan ini menandatangani kontrak pengembangan sistem anti-rudal pada bulan Januari 2007. Sistem anti-rudal ini diberi nama *Terminal High Altitude Area Defense* atau THAAD. Sejak tahun 1992, THAAD memiliki 30 rudal balistik dengan daya jelajahnya mencapai 30 km. Pengerjaan THAAD ini dibawah kendali *Missile Defense Agency*.